

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Studi di Kabupaten Sumenep)”. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang berperan dalam pembentukan karakter keislaman, keilmuan, dan kebangsaan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan hukum sekaligus mandat kepada pemerintah, termasuk DPRD, untuk mendukung penguatan pesantren melalui kebijakan dan regulasi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Sumenep dalam mendorong regulasi daerah yang mendukung eksistensi dan pengembangan pesantren pasca berlakunya UU Pesantren, serta mengidentifikasi langkah konkret yang dilakukan DPRD dalam menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Sumenep telah mengambil langkah konkret dengan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025. Selain itu, DPRD juga melakukan penyerapan aspirasi melalui kunjungan ke pesantren, memperjuangkan dukungan anggaran, serta mendorong peningkatan kualitas SDM pesantren. Meskipun terdapat kritik dari beberapa fraksi mengenai potensi tumpang tindih aturan dan intervensi terhadap kemandirian pesantren, secara umum DPRD telah menunjukkan komitmen serius dalam menerjemahkan amanat UU Pesantren ke tingkat lokal.

Kesimpulannya, peran DPRD Kabupaten Sumenep cukup strategis dalam implementasi UU Pesantren, khususnya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi DPRD dalam mengawal proses legislasi hingga tahap implementasi agar manfaat regulasi dapat dirasakan nyata oleh pesantren.

Kata Kunci: DPRD, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, Regulasi Daerah

ABSTRACT

This research is entitled “The Role of the Regional House of Representatives (DPRD) in the Implementation of Law Number 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools (A Study in Sumenep Regency)”. The background of this study lies in the significant role of Islamic boarding schools (pesantren) as the oldest Islamic educational institutions in Indonesia, contributing to the development of religious, scientific, and national character. The enactment of Law Number 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools provides formal recognition and mandates the government, including the DPRD, to support pesantren through policies and local regulations. The purpose of this research is to analyze the role of DPRD Sumenep Regency in encouraging local regulations that support the existence and development of pesantren after the enactment of the Law on Pesantren, as well as to identify the concrete steps taken by DPRD in following up the mandate of the law.

This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, using interviews, document studies, and observations conducted in Sumenep Regency. The results indicate that DPRD Sumenep has taken concrete measures by proposing a Draft Regional Regulation (Raperda) on Pesantren, which has been included in the 2025 Regional Legislation Program (Propemperda). In addition, DPRD has absorbed aspirations through direct visits to pesantren, advocated budgetary support, and promoted the improvement of pesantren human resources. Although some political factions have criticized the potential overlap of regulations and interference with pesantren independence, overall DPRD has demonstrated a strong commitment to translating the mandate of the Law on Pesantren into local governance.

In conclusion, the role of DPRD Sumenep Regency is strategically significant in implementing the Law on Pesantren, particularly through its legislative, budgetary, and supervisory functions. However, its effectiveness largely depends on DPRD’s consistency in monitoring the legislative process and ensuring proper implementation so that the regulations can bring tangible benefits to pesantren.

Keywords: DPRD, Law No. 18 of 2019, Local Regulation